

DAMPAK PEMBANGUNAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) KABUPATEN MERAUKE

Impact of the Development of Merauke Regency Integrated Marine and Fisheries Center

***Budi Wardono, Hikmah Hikmah, dan Hakim Miftahul Huda**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 30 Agustus 2021; Diterima setelah perbaikan: 4 Maret 2022;
Disetujui terbit: 21 Juni 2022

ABSTRAK

Keberadaan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) diproyeksikan untuk mendorong pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan. Salah satu lokasi pengembangan SKPT adalah Merauke, yang diproyeksikan menjadi pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu di wilayah perbatasan, mulai dari hulu sampai ke hilir dengan berbasis kawasan di lokasi tersebut. Pertanyaannya adalah sejak diluncurkan beberapa tahun lalu, seberapa jauh upaya pengembangan SKPT ini membawa dampak. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pengembangan SKPT di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut pada bulan Agustus—November 2018 dan dimutakhirkan berdasarkan data yang dikumpulkan pada pada Februari 2022. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus di kawasan SKPT Merauke dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan SKPT membawa sejumlah dampak positif bagi perkembangan perikanan di wilayah itu. Dampak primer adalah berupa dorongan untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha perikanan. Lebih lanjut, dampak primer tersebut memicu peningkatan aktivitas usaha perikanan dapat mendorong konektivitas dan perkembangan aktivitas usaha hulu maupun hilir. Termasuk dalam perkembangan aktivitas hulu adalah (i) penyediaan sarana dan prasarana penangkapan, (ii) perkembangan galangan kapal, (iii) penyediaan perbekalan, BBM, perbengkelan, dan suku cadang. Termasuk perkembangan aktivitas hilir, adalah: (i) pengolahan, (ii) pembiayaan, (iii) distribusi ikan, (iv) jasa bongkar, dan (v) pergudangan. Terlepas dari dampak-dampak positif tersebut, penelitian ini menemukan kurangnya partisipasi swasta. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan tetap berlanjutnya investasi pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana fisik, yang diarahkan untuk menarik investasi swasta dan menjadi stimulus perkembangan perekonomian di Kabupaten Merauke.

Kata Kunci: Merauke; perikanan; dampak; SKPT; hulu; hilir

ABSTRACT

The existence of the Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is projected to encourage the development and utilization of potential fishery resources. One of the locations for the development of the SKPT is Merauke, which is projected to become an integrated marine and fisheries business center in the border area, from upstream to downstream based on the area in that location. The question is, since it was launched several years ago, how far has this SKPT development effort made an impact. Therefore, this study aims to analyze the impact of developing SKPT in Merauke Regency, Papua Province. This research was conducted at the location in August-November 2018 and was updated based on data collected in February 2022. The research was carried out using a case study approach in the SKPT Merauke area with a qualitative descriptive analysis method. The results showed that the development of SKPT brought a number of positive impacts for the development of fisheries in the region. The primary impact is the encouragement to provide facilities and infrastructure for fishery business activities. Furthermore, the primary impact triggers an increase in fishery business activities that can encourage the connectivity and development of upstream and downstream business activities. The development of upstream activities includes (i) provision of fishing facilities and infrastructure, (ii) development of shipyards, (iii) provision of supplies, fuel, workshops, and spare parts. The development of downstream activities includes: (i) processing, (ii) financing, (iii) fish distribution, (iv) unloading services, and (v) warehousing. Despite these positive impacts, this study finds a lack of private participation. Therefore, this study recommends continuing government investment to improve physical facilities and infrastructure, which is directed to attract private investment and become a stimulus for economic development in Merauke Regency.

Keywords: Merauke; fishery; impact; SKPT; upstream; downstream

PENDAHULUAN

Pemerintah menyadari terjadinya ketimpangan dan lambatnya pembangunan di pulau-pulau kecil, terluar, dan perbatasan. Kesenjangan antarwilayah dan ketertinggalan suatu daerah masih menjadi isu yang harus diatasi. Kebijakan akselerasi pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah agar dapat berjalan secara efektif (Santandrea, Samuel, & Elvi, 2018).

Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) merupakan salah satu program terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatasi kesenjangan di kawasan pulau-pulau kecil, terluar, dan perbatasan. Program SKPT ini merupakan konsep dengan pendekatan berbasis wilayah, budaya, dan bisnis yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain (KKP, 2017). Konsep SKPT dengan prinsip integritas, efisiensi, kualitas, dan akselerasi yang tinggi berguna untuk membangun dan mengembangkan bisnis perikanan yang berbasis sentra di pulau-pulau terdepan (KKP, 2017). Lokasi utama yang menjadi fokus SKPT adalah Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Rote Ndao, Sumba Timur, Saumlaki, Morotai, Merauke, Biak Numfor, Mimika, dan Moa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/Permen-KP/2016 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/Permen-KP/2019 (KKP, 2019). Pembangunan pulau-pulau kecil, terluar, dan perbatasan dengan potensi perikanan yang besar menjadi penting sehingga diperlukan reorientasi pendekatan pembangunan menjadi pendekatan pembangunan wilayah yang berbasis sumber daya domestik (Rustiadi, 2003).

SKPT merupakan program pembangunan perikanan. Program ini mengutamakan produksi perikanan yang optimal untuk tujuan ekspor yang didukung dengan prinsip dari hulu ke hilir dengan berbasis kawasan dan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, serta kualitas produk kelautan dan perikanan; meningkatkan pendapatan nelayan, pembudi daya, pengolah ikan, dan masyarakat pulau-pulau kecil, terluar, dan perbatasan; serta mengembangkan kawasan ekonomi kelautan

dan perikanan yang terintegrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Tujuan SKPT adalah membangun dan mengintegrasikan proses bisnis perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan di pulau-pulau terluar atau terdepan wilayah NKRI. Indikator kinerja yang menjadi acuan SKPT adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, produksi perikanan, nilai investasi, nilai kredit yang disalurkan, ragam produk olahan, utilitas unit pengolahan ikan (UPI), dan nilai ekspor. Hal yang akan didorong untuk mencapai integrasi dalam pembangunan SKPT mencakup pendaratan hasil kelautan dan perikanan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, hingga aspek pemasaran.

Program pembangunan SKPT dilakukan melalui pembangunan infrastruktur untuk menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh nelayan, seperti ketersediaan akses jalan, listrik, bahan bakar, air bersih, rumah singgah nelayan, serta kebutuhan logistik (Permen-KP 46/2015). SKPT Kabupaten Merauke terpusat di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke yang terintegrasi dengan Pelabuhan Merauke. Pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian suatu daerah sehingga suatu daerah dapat berkembang dengan adanya pelabuhan. Namun, terlebih dahulu harus ditentukan sektor apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan sehingga dengan bertambahnya permintaan barang dan jasa terhadap wilayah tersebut, bertambah pula kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung terjadinya kegiatan ekspor sektor ke luar daerah (Gantara & Achmadi, 2012). Salah satu sarana dan prasarana transportasi yang dibutuhkan adalah pelabuhan yang berfungsi untuk mendistribusikan ikan hasil tangkapan nelayan dan sebagai pintu ekspor hasil perikanan tersebut.

Dalam pelaksanaan program pembangunan SKPT terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, baik masalah internal maupun eksternal. Perlunya percepatan pembangunan infrastruktur merupakan masalah internal yang harus ditangani, sedangkan masalah eksternal adalah masalah yang berada di luar kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pembangunan SKPT memfasilitasi pelaku usaha yang berada pada suatu kawasan agar dapat berkembang dan maju. Penyediaan fasilitas yang berkaitan langsung dengan proses produksi

ataupun faktor penunjang usaha perikanan di Kabupaten Merauke dilaksanakan dengan adanya SKPT Merauke. Pentingnya perikanan tangkap bagi perekonomian lokal atau nasional tidak hanya mencakup lapangan kerja yang diciptakan dalam sektor itu sendiri, tetapi juga terhadap yang diciptakan di sektor-sektor terkait lainnya (Bene, 2006). Hal ini berkaitan dengan konsep keterkaitan hulu dan hilir. Eksploitasi sumber daya, termasuk sektor perikanan, harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal agar tidak banyak terjadi kebocoran daerah (Rustiadi et al., 2017). Interaksi antarwilayah dapat memengaruhi perkembangan bisnis yang pada gilirannya dapat pula mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Sjafrizal, 2012).

Permasalahan di atas menyebabkan pembangunan di Kabupaten Merauke harus dilakukan. Menurut Budianta (2010), upaya mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah dilakukan dengan (a) mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, (b) meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal, (c) mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan menjadi *outward looking*, dan (d) meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antarwilayah. Perencanaan pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pendekatan sektoral memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut, sedangkan pendekatan regional melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah (Tarigan, 2008). Upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di pulau-pulau kecil, terluar, dan perbatasan dilakukan dengan program SKPT. Namun demikian, menurut Zulham, Arthatiani, Hafsaridewi, dan Mira (2019), ada beberapa isu terkait operasionalisasi SKPT, yaitu isu kelembagaan, isu infrastruktur, dan isu kesenjangan teknologi untuk pemanfaatan sumber daya ikan. Perbedaan karakteristik wilayah dan budaya antara satu lokasi dan lokasi lainnya dapat menjadi penghambat pembangunan.

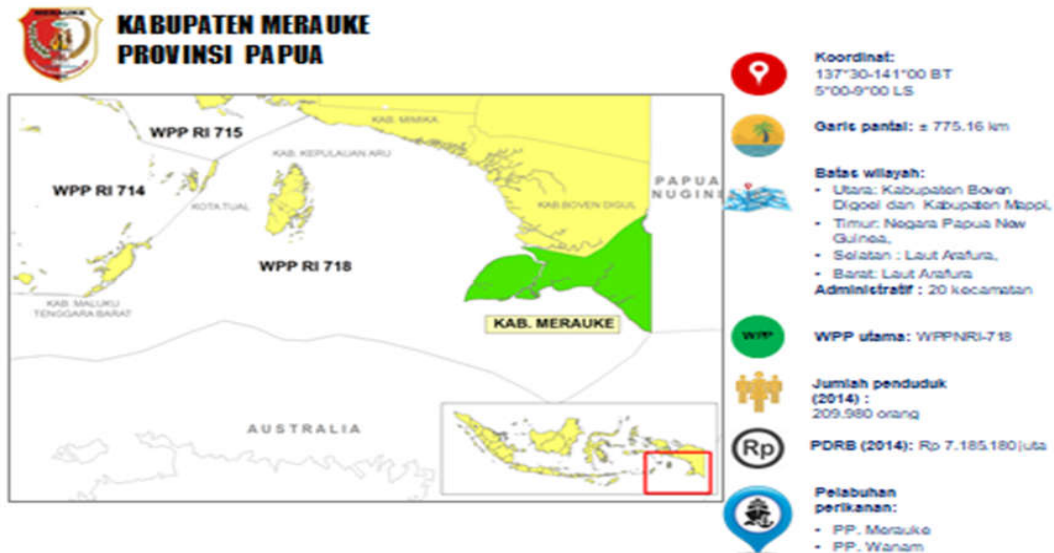
Pendekatan pembangunan SKPT menggunakan pendekatan kebijakan *supply side*, yaitu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Kebijakan ini dicapai melalui inisiatif kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas

dan/atau kualitas faktor produksi perekonomian dari waktu ke waktu. Kebijakan *supply side* ini melibatkan kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi serta melibatkan intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar (Rustiadi, Hakim, & Panuju, 2017). Pemerintah melakukan investasi melalui pengeluaran pemerintah (dana APBN KKP) untuk pembangunan infrastruktur, dermaga, kapal, pabrik es, *cold storage*, jalan penghubung, jaringan listrik, serta sarana transportasi, *training*, dan komunikasi. Jaya (1999) menyatakan bahwa sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah. Kebijakan lain yang perlu ditetapkan untuk mendorong mobilisasi sumber daya adalah mengembangkan pusat pertumbuhan secara tersebar di beberapa wilayah dan kota tertentu. Kebijakan itu diharapkan mampu menarik investor untuk melakukan penanaman modal di lokasi tersebut (Sjafrizal, 2012).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Kabupaten Merauke. Penelitian telah dilakukan pada bulan Agustus–November 2018 di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua (Gambar 1) dan informasi lanjutan dikumpulkan pada bulan Februari 2022. Lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi pelaksanaan SKPT sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 46/Permen-KP/ 2016 (KKP, 2016).

Data yang dikumpulkan terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder yang berupa dokumen tertulis dikumpulkan melalui penelusuran/koleksi data, baik melalui *website* maupun instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke dan BPS. Data primer aktivitas ekonomi SKPT diperoleh melalui hasil wawancara dengan responden, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan di lokasi kegiatan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang terkait dengan informasi aktivitas ekonomi.

Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun atau *focus group discussion* (FGD) dilakukan untuk menggali berbagai masalah yang terkait dengan ketersediaan sumber daya perikanan, peran aktor (nelayan dan pemangku kepentingan), bisnis perikanan, dan sarana prasarana di kawasan SKPT Merauke, serta berbagai permasalahan yang



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan Penelitian di Kabupaten Merauke.
Figure 1. Map of Research Locations in Merauke Regency.

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke (2018)/
Source: Maritime Affairs and Fisheries Office of Merauke Regency (2018)

dihadapi dalam pengembangan SKPT Merauke. Peserta FGD terdiri atas perwakilan pemerintah pusat dan daerah (6 orang), penyedia BBM (1 orang), nelayan (4 orang), penyedia perbekalan (2 orang), dan Pelabuhan Merauke (1 orang).

Penelitian ini merupakan studi kasus pada SKPT Merauke. Penelitian studi kasus bertujuan menjelaskan dan memahami objek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu "kasus". Yin (2002) menyatakan bahwa penelitian studi kasus digunakan untuk menjelaskan mengapa kasus tersebut dapat terjadi dan bagaimana keberadaannya. Studi kasus memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter khas suatu kasus ataupun status individu. Kemudian, sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan hal yang bersifat umum.

Pemilihan sampel responden dilakukan secara *purposive* dan *snowball*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2010). Responden penelitian ini adalah nelayan lokal, nelayan pendatang/ andon, dan pelaku usaha/pengelola *cold storage*/ pengepul/pedagang yang berada di SKPT Merauke. Informan kunci adalah orang yang bersedia memberikan dan memiliki informasi yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian serta

data dan informasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pemangku kepentingan yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antara berbagai kategori data untuk membangun teori substantif yang berasal dari data yang tersedia (Marshall & Rossman, 2015). Urutan pekerjaan menganalisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengategorikan data yang didapat berdasarkan keperluan yang terkait dengan tujuan penelitian, kemudian diinterpretasikan serta dikemukakan dalam deskripsi analisis.

Pokok bahasan potensi sumber daya ikan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data potensi sumber daya ikan pada WPP 718 dan SKPT Merauke serta dari sumber lain yang terkait dengan potensi dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Analisis dampak SKPT Merauke dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan SKPT Merauke (Kepala SKPT Kabupaten Merauke/ Kepala Pelabuhan Perikanan Merauke, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke, kepala kantor pengawasan, dan kepala kantor karantina ikan). Hasil wawancara ditabulasikan,

kemudian disusun narasi yang menggambarkan dampak pelaksanaan program SKPT Merauke. Wawancara dan diskusi juga dilakukan dengan para pelaku usaha (ABK/agen kapal, pedagang/pengepul, dan pengolah) untuk mendapatkan perspektif terkait dengan dampak SKPT Merauke menurut pelaku usaha. Pembahasan tentang dampak dan permasalahan SKPT Merauke dilakukan dengan FGD yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

POTENSI SUMBER DAYA PERIKANAN

Kabupaten Merauke mempunyai potensi perikanan tangkap laut yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718. Potensi perikanan di WPP 718 sesuai dengan KP tentang potensi sumber daya perikanan WPPRI mengalami peningkatan potensi perikanan secara keseluruhan dari tahun 2016 dan 2017 (KKP, 2017). Tingkat pemanfaatannya cukup tinggi, yakni dua kelompok jenis ikan (ikan karang dan cumi-cumi) masuk dalam kelompok pemanfaatan yang *over exploited* dan tujuh kelompok jenis ikan (ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang, lobster, kepiting, dan rajungan) masuk dalam kelompok pemanfaatan *fully exploited*. Tidak ada kelompok ikan

yang pemanfaatannya masih *moderate*. Agar sumber daya ikan di perairan WPPRI berada dalam ketahanan yang berkelanjutan, harus dilakukan penataan upaya penangkapan dengan mengurangi jumlah upaya penangkapan sesuai dengan acuan upaya optimal (f.opt) pada WPP yang mengalami kondisi *overfishing* (Suman et al., 2018), atau minimal tetap mempertahankan posisi upaya penangkapan seperti saat ini untuk kelompok ikan yang pemanfaatannya sudah *fully exploited* (Tabel 1).

Upaya penangkapan kelompok ikan yang sudah *over exploited* (kelompok ikan karang dan cumi-cumi) harus dikurangi sampai dengan jumlah boleh tangkap agar sumber daya perikanan di WPP 718 dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Data statistik perikanan Indonesia menunjukkan tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan demersal di WPP 718 lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pemanfaatan optimal (Sari et al., 2019). Karakteristik usaha penangkapan ikan pelagis kecil adalah tingkat produksinya dipengaruhi oleh ketersediaan stok sumber daya ikan dan siklus musim. Siklus musiman menentukan keberlangsungan usaha penangkapan ikan pelagis (Taeran, 2007; Abdullah, 2011).

Tabel 1. Potensi Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 Tahun 2016 dan 2017.

Table 1. Potency of Fisheries Resources at Fisheries Management Areas 718 in 2016 and 2017.

Kelompok Jenis Ikan/ Group of Fish Types	Tahun/Year 2016 Potensi/ Potency (Ton)	JTB/TAC (Ton)	Tingkat Pemanfaatan/ Utilization Rate	Tahun/Year 2017 Potensi/ Potency (Ton)	JTB/TAC (Ton)	Tingkat Pemanfaatan/ Utilization Rate
Ikan pelagis besar*/ Big pelagic fish	489.795	391.836	0,65 (F)	818.870	655.096	0,99 (F)
Ikan pelagis kecil/ Small pelagic fish	823.328	658.662	0,52 (F)	836.973	669.579	0,51 (F)
Ikan demersal/ Demersal fish	586.277	469.022	1,14 (O)	876.722	701.378	0,67 (F)
Udang penaeid/ Penaeid shrimp	53.502	42.802	1,3 (O)	62.842	50.274	0,86 (F)
Ikan karang konsumsi/ Reef fish	30.555	24.444	0,5 (F)	29.485	23.588	1,07 (O)
Lobster/Lobster	386	309	1,23 (O)	1.187	950	0,97 (F)
Kepiting/Crab	1.507	1.205	0,77 (F)	1.498	1.198	0,85 (F)
Rajungan/Crab	1.911	1.529	0,17 (M)	775	620	0,77 (F)
Cumi-cumi/Squid	5.470	4.376	0,7 (F)	9.212	7.370	1,28 (O)
Total	1.992.730			2.637.565		

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Kepmen-KP/2016 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/Kepmen-KP/2017

Keterangan:

*ikan pelagis besar nontuna: tongkol, tenggiri, setuhuk, layaran, lemadang

Tingkat pemanfaatan (E): $E < 0.5 = moderate$; $0.5 \leq E < 1 = fully-exploited$; $E \geq 1 = over-exploited$

PROGRAM SKPT

Pembangunan SKPT Merauke meliputi beberapa kelengkapan dan sarana fisik, yakni dermaga, SPBN, TPI, gedung perkantoran, jalan, *cold storage*, kios perbekalan, dan sarana lainnya (Tabel 2). Berfungsinya Pelabuhan Perikanan Merauke sejak tahun 2017 telah mendorong berkembangnya bisnis ikutan sebagai mata rantai bisnis usaha perikanan tangkap. Jaringan usaha sektor perikanan melibatkan banyak pihak dan hubungan saling keterkaitan antara para

pelaku. Beberapa fasilitas merupakan tambahan dari fasilitas yang sudah ada sebelumnya.

Pembangunan sarana dan prasarana tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan/tahun. Pembangunan dermaga merupakan lanjutan pengembangan dermaga yang sudah ada. Pembangunan dermaga dilakukan dengan menambah panjang dermaga sehingga bisa menampung kapal dalam jumlah yang lebih banyak. Fasilitas dan sarana tersebut dibangun untuk mendukung operasionalisasi Pelabuhan Perikanan

Tabel 2. Program dan Status Sarana Fisik SKPT Merauke.
Table 2. Program and Status of Physical Facilities at SKPT Merauke.

No	Fasilitas/ Facilities	Lokasi/ Location	Kegunaan/ Function	Dampak/ Impact	Keterangan/ Remark
1	Dermaga PP Merauke	Pelabuhan Perikanan Merauke	Memperlancar aktivitas bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan sebagai tempat tambat labuh kapal nelayan; aktivitas di kapal nelayan sebelum melaut	Kapal nelayan dapat melakukan bongkar muat di kawasan pelabuhan perikanan	Dermaga dibangun dalam tiga tahap (2011, 2015, dan 2017). Semua sudah beroperasi dan digunakan untuk aktivitas nelayan.
2	Turap PP Merauke	Pelabuhan Perikanan Merauke	Menahan lajur erosi di kawasan pelabuhan	Kawasan pelabuhan terhindar dari erosi dan percepatan pendangkalan	Berfungsi
/3	Jalan PP Merauke	Pelabuhan Perikanan Merauke	Memperlancar distribusi ikan hasil tangkapan yang dibawa ke luar area pelabuhan	Kelancaran distribusi	Beroperasi/digunakan
4	TPI Higienis PP Merauke	Pelabuhan Perikanan Merauke	Melakukan aktivitas penanganan ikan hasil tangkapan nelayan	Proses penanganan jual beli ikan dengan lebih baik	Dimanfaatkan
5	Bangunan air bersih	Pelabuhan Perikanan Merauke	Memenuhi kebutuhan air untuk kawasan pelabuhan dan air bersih untuk keperluan kapal nelayan	Terpenuhinya kebutuhan air di kawasan dan kebutuhan air bersih nelayan/kapal	Selesai dan dimanfaatkan
6	<i>Ice flake machine</i>	Pelabuhan Perikanan Merauke	Menyediakan es bagi nelayan	Tersedianya es untuk nelayan	Selesai dan digunakan
7	Gudang beku (<i>cold storage</i>)	Pelabuhan Perikanan Merauke	Memproses ikan dan membekukan ikan hasil tangkapan nelayan	Kualitas ikan lebih terjaga	Sudah selesai dan sudah dimanfaatkan
8	Pagar pengaman dermaga	Pelabuhan Perikanan Merauke	Menjaga keamanan kawasan pelabuhan	Terjaganya keamanan kawasan pelabuhan	Selesai dan digunakan
9	Jaringan listrik (PP Merauke)	Pelabuhan Perikanan Merauke	Mendukung operasional, sumber penerangan, sumber listrik untuk pembekuan, dll.	Operasional kawasan dapat berlangsung (kantor, <i>isce flake</i> , <i>cold storage</i> , penerangan, dll.)	Selesai dan berfungsi
10	Gedung perkantoran dan rumah dinas	Pelabuhan perikanan Merauke	Melakukan aktivitas perkantoran dalam menunjang operasional SKPT Merauke	Aktivitas perkantoran dapat berlangsung dalam menunjang aktivitas usaha perikanan	Selesai dan berfungsi
10	Kios perbekalan melaut	Pelabuhan Perikanan Merauke	Menyediakan perbekalan bagi nelayan dan petugas di kawasan pelabuhan	Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan sarana dan perbekalan	Beroperasi dan digunakan

Sumber: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021)/Source: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021).

Merauke sebagai sentra SKPT Kabupaten Merauke. Tersedianya fasilitas tersebut diharapkan mampu menjadi pendorong peningkatan aktivitas kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan tambat labuh di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke.

AKTIVITAS PELAKU USAHA DI SKPT MERAUKE

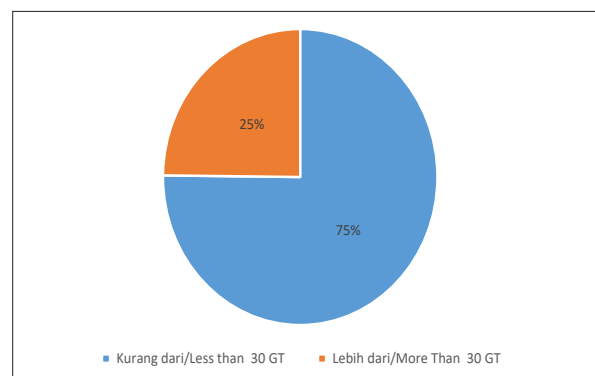
Berkembangnya sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Merauke/SKPT Merauke memengaruhi aktivitas pelaku usaha. Salah satu aktivitas utama adalah aktivitas kapal perikanan yang melakukan bongkar muat hasil tangkapan. Kapal-kapal yang melakukan bongkar muat terdiri atas berbagai ukuran. Jumlah kunjungan kapal nelayan didasarkan pada ukuran kapal (GT). Pada tahun 2018 sampai dengan 2021 jumlah kapal yang melakukan aktivitas di PPN Merauke tampak pada Tabel 3. Sebaran jumlah kapal yang melakukan aktivitas di PPN Merauke bervariasi berdasarkan ukuran armada kapal nelayan. Aktivitas kapal nelayan didominasi oleh kapal berukuran 20—30 GT.

Kapal dengan ukuran di bawah 30 GT merupakan kapal yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah, sedangkan kapal berukuran lebih dari 30 GT merupakan kapal yang mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Kapal perikanan tersebut beroperasi di wilayah WPP 718 dan membongkar muatan di Pelabuhan Perikanan Merauke.

Kapal berukuran 26—30 GT mengalami pertumbuhan paling besar. Kapal tersebut merupakan kapal dengan izin pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Perikanan

Merauke sudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap dengan mayoritas kapal berizin pemerintah daerah. Dominannya aktivitas kapal-kapal berizin pemerintah daerah di Pelabuhan Perikanan Merauke diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kapal-kapal yang berukuran lebih dari 30 GT adalah kapal-kapal berizin pemerintah pusat yang berasal dari luar wilayah Merauke. Kapal tersebut berasal dari Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kepulauan Riau. Lokasi penangkapan ikan yang didaratkan di Kabupaten Merauke berasal dari WPP 718, yakni Laut Arafuru, Laut Aru, Perairan Wanam, dan Selat Papua. Proporsi kapal didasarkan pada perizinannya (Gambar 2). Kapal penangkap ikan didominasi kapal dengan izin pemerintah daerah, yakni sebanyak 75 %, sedangkan kapal dengan izin pemerintah pusat sebanyak 25%.



Gambar 2. Komposisi Kapal Penangkap Ikan Berdasarkan Bobot GT.

Figure 2. Composition of Fishing Vessels by Weight.

Tabel 3. Jumlah Kunjungan Armada Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan /SKPT Kabupaten Merauke Tahun 2018—2021.

Table 3. Number of Fishing Vessel Visit in SKPT Merauke in 2018—2021.

Ukuran Kapal/Size of Fishing Vessels (GT)	Tahun/Year				Pertumbuhan/Trend 2018—2021
	2018	2019	2020	2021	
0—5	2	0	0	0	-100,00
6—10	5	3	0	0	-100,00
11—15	35	68	47	51	45,71
16—20	110	149	85	91	-17,27
21—25	138	159	140	163	18,12
26—30	390	506	512	620	58,97
31—35	56	47	43	32	-42,86
51—100	245	174	113	92	-62,45
101—150	119	89	69	30	-74,79
151—200	44	35	13	8	-81,82
>200	20	12	13	5	-75,00
Total	1.164	1.242	1.035	1.092	-6,19

Sumber: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, 2021, dan 2022)/ Source: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, 2021, dan 2022)

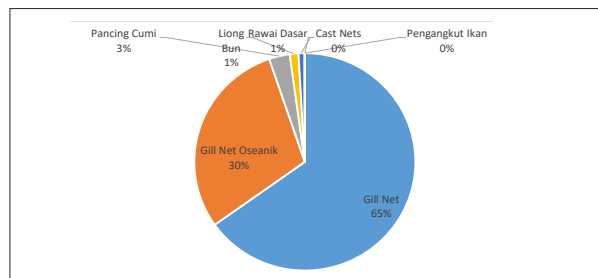
Nelayan lokal menggunakan kapal berukuran kecil 1—5 GT dan beroperasi di sepanjang wilayah pesisir pantai dan berada di luar kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke. Karakteristik nelayan lokal adalah cenderung menangkap ikan di daerah penangkapan yang dekat dengan pantai dan menangkap ikan dengan cara *one day fishing*. Jumlah armada perahu tanpa motor di Merauke juga cukup besar, yaitu mencapai 558 armada.

Perikanan skala kecil juga dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), biasanya untuk pemenuhan sendiri (*subsisten*) yang sering disebut sebagai *peasant fisher* karena alokasi hasil tangkapan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari daripada yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha (Satria, 2009). Perikanan tangkap skala kecil sering didasarkan pada komunitas kecil di pesisir yang bergantung pada sumber daya lokal yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi di sekelilingnya, baik negatif maupun positif.

Aktivitas kapal nelayan yang berasal dari luar daerah mengalami penurunan selama masa pandemi. Hal tersebut merupakan dampak kebijakan penanganan penularan Covid-19 sehingga banyak nelayan dan kapal yang tidak melakukan aktivitas penangkapan. Dilihat dari karakteristiknya, perikanan skala besar dan skala kecil dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, antara lain kepemilikan, besarnya investasi, jenis dan ukuran kapal, tujuan dan hasil tangkapan,

alat tangkap, lama penangkapan, pemrosesan, dan pemasaran (Berkes, Mahon, McConney, Pollnac, & Pomeroy, 2001; Bjorndal, Child, & Lem, 2014). Kapal-kapal berukuran lebih dari 30 GT sebagian berasal dari luar Merauke.

Jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan pada tahun 2021 berjumlah 1.092 unit. Sebaran alat tangkap yang digunakan tampak pada Gambar 3. Jenis alat tangkap yang dominan digunakan nelayan adalah *gill net* dan *gil net oceanic* untuk menangkap ikan dasar.



Gambar 3. Komposisi Alat Tangkap Kapal Penangkap Ikan di Pelabuhan Perikanan Merauke Tahun 2021.

Figure 3. Composition of Fishing Gear at Merauke Fishing Port in 2021.

Distribusi produksi ikan di SKPT Merauke berdasarkan kelompok jenis ikannya dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4, produksi ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Merauke didominasi oleh jenis ikan kuro, manyung, dan cumi (setiap jenis berkontribusi 11—29%). Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Merauke diproses untuk dibekukan di beberapa *cold storage*,

Tabel 4. Produksi Ikan Tahun 2018—2020 Berdasarkan Jenisnya di SKPT Merauke (Ikan Dibongkar).
Table 4. Fish Production in 2018—202 at SKPT Merauke by Type.

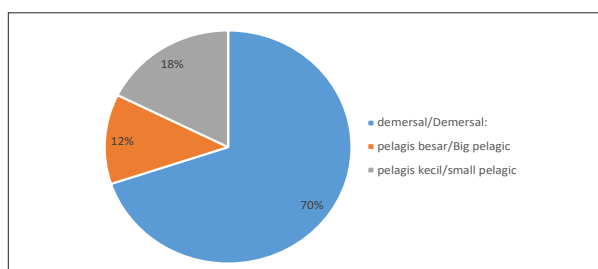
No.	Jenis Ikan/ Fish Type	Produksi/Production (Ton)		
		2018	2019	2020
1	Kakap putih/ <i>white snapper</i>	408.513	199.797	199.200
2	Kakap merah/ <i>red snapper</i>	199.797	132.168	62.074
3	Manyung	2.273.978	1.068.397	1.008.851
4	Gulamah	804.713	209.907	149.823
5	Bawal hitam	500.273	159.212	123.697
6	Bawal jenggot	275.918	278.587	213.081
7	Tenggiri	601.999	421.936	250.845
8	Kuro	2.112.438	2.086.203	1.685.037
9	Angkui/kakap cina	374.357	165.067	175.849
10	Kerapu/ <i>grouper</i>	47.919	18.317	15.374
11	Hiu/ <i>shark</i>	497.690	345.885	311.568
12	Mubara	274.982	149.933	125.248
13	Marlin	29.110	33.133	4.150
14	Baby Tuna/ <i>baby tuna</i>	771.553	115.800	21.700
16	Senangin	486.952	285.148	180.413
17	Cumi-cumi/ <i>squid</i>	1.717.560	736.000	677.845
19	Ikan campuran/lainnya (berbagai jenis ikan)/ <i>others</i>	2.067.980	740.654	497.364
Jumlah		13.445.731,8	7.146.143,8	5.702.117,7

Sumber: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021)/ Source: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021).

baik yang ada di kawasan pelabuhan maupun yang berada di luar kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke.

Produksi ikan sebagian besar didistribusikan atau dikirim ke Pulau Jawa (Lamongan, Probolinggo, Indramayu, dan beberapa wilayah lain). Distribusi tersebut dilakukan dengan menggunakan peti kemas/kargo berpendingin (*refrigerated cargo*) yang diangkut dengan kapal laut. Setelah sampai di pelabuhan tujuan (Surabaya/Gresik/Lamongan/Probolinggo), ikan didistribusikan ke pabrik/pelabuhan pengolahan di berbagai lokasi. Selain untuk memenuhi bahan baku pabrik dalam negeri, sebagian ikan tersebut diekspor ke beberapa negara tujuan (Cina, Thailand, dan lain-lain).

Komposisi hasil tangkapan didasarkan pada kelompok jenis ikan (Gambar 4). Hasil tangkapan didominasi oleh jenis ikan demersal (70%), ikan pelagis besar (12%), dan ikan pelagis kecil (18%).



Gambar 4. Jenis dan Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pelabuhan Perikanan Merauke Tahun 2020.

Figure 4. Types and Composition of Fish Landed at the Merauke Fishing Port in 2020.

Peta potensi dan pemanfaatan sumber daya di WPP 718 menunjukkan bahwa ketiga kelompok ikan tersebut dalam tingkat pemanfaatannya *full exploited*. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk mengaturnya dan agar pemanfaatan ketiga kelompok jenis ikan tersebut tidak menjadi *over exploited*.

DAMPAK KEHADIRAN ARMADA PENANGKAPAN DARI LUAR MERAUKE

Selain melakukan penangkapan ikan untuk dimanfaatkan dagingnya, kapal nelayan yang berasal dari luar daerah juga melakukan

penangkapan untuk mengambil gelembung ikan dan sirip ikan. Ikan kakap cina, kuro, manyung, dan gulamah merupakan sumber utama gelembung ikan. Penangkapan ikan hiu sebagian besar dilakukan untuk dimanfaatkan siripnya. Jumlah produksi gelembung ikan dan sirip ikan tampak pada Tabel 5.

Sirip dan gelembung ikan merupakan produk ekspor unggulan/primadona di Merauke. Harga gelembung ikan gulamah dapat mencapai 30 juta rupiah per kilogramnya. Harga gelembung kakap cina mencapai 9 juta rupiah per kilogramnya. Kemudian, harga gelembung kakap putih mencapai 3 juta rupiah per kilogramnya. Gelembung jenis ikan yang lain berada pada kisaran 180 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah per kilogramnya. Gelembung ikan dari Merauke selanjutnya dikirim ke Jakarta untuk diekspor ke beberapa negara, terutama Cina, Singapura, dan Hong Kong.

Sebagian produksi ikan masih didaratkan di luar kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke. Nelayan mendaratkan ikan di tempat pendaratan ikan/tangkapan yang dimiliki oleh pribadi/swasta yang berada di sepanjang muara Sungai Maro. Beberapa dermaga atau pendaratan ikan yang berada di sepanjang muara Sungai Maro adalah Dermaga Sakier, Dermaga Laurensia Tanzil, Dermaga Pitono, PP Merauke, Dermaga Saenal, Sidomulyo, Dermaga Mansyur, Dermaga Polair, Dermaga Edy Lie, Dermaga Subindo, Dermaga Oce, dan Dermaga Beny Tandra. Dermaga tersebut merupakan milik pribadi/swasta yang digunakan untuk aktivitas bongkar muat ikan hasil tangkapan yang selanjutnya diproses di *cold storage* milik pribadi. Ikan tersebut selanjutnya didistribusikan ke Pulau Jawa dengan menggunakan jasa kargo berpendingin.

Dengan berfungsinya Pelabuhan Perikanan Merauke, diharapkan bongkar muat kapal yang semula dilakukan di tempat pendaratan-ikan pribadi atau tangkahan bisa dilakukan di Pelabuhan Perikanan Merauke. Apabila semua kegiatan pendaratan ikan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Merauke, pencatatan produksi ikan akan menjadi lebih baik. Selama ini petugas melakukan

Tabel 5. Produksi Gelembung Ikan di SKPT Merauke Tahun 2018—2021 (Kg).

Table 5. Production of Fins and Fish Bubbles in SKPT Merauke in 2018—2021 (Kg).

No	Jenis Produksi/ Type of Production	Produksi/Production (Kg)			
		2018	2019	2020	2021
1	Sirip hiu/ <i>Shark fins</i>	6.549	9.370	11.623	12.339
2	Gelembung/ <i>Fish maw</i>	11.381	8.278	10.393	13.998,55

Sumber: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021)/Source: PPN/AFP Merauke (2019, 2020, dan 2021).

pencatatan produksi ikan yang didaratkan di luar pelabuhan perikanan dengan mendatangi tempat-tempat pendaratan ikan tersebut.

DAMPAK SKPT TERHADAP PERKEMBANGAN BISNIS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pembangunan SKPT Merauke meliputi penyediaan kelengkapan dan sarana fisik untuk mendukung kelancaran usaha perikanan. Fasilitas tersebut dibangun dengan beberapa tahapan. Berfungsinya SKPT Merauke/Pelabuhan Perikanan Merauke sejak tahun 2017 telah mendorong berkembangnya bisnis-bisnis ikutan sebagai mata rantai bisnis usaha perikanan tangkap. Dampak pembangunan SKPT ditunjukkan dengan berfungsinya fasilitas yang dibangun di kawasan SKPT tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Jumlah kapal penangkap ikan dari luar daerah yang berlabuh

Kapal penangkap ikan beroperasi di Laut Merauke dan memanfaatkan Pelabuhan Perikanan Merauke untuk tambat labuh. Kapal tersebut sebagian besar berasal dari luar daerah, yaitu dari Probolinggo, Indramayu, Sulawesi Selatan, Tanjung Balai Karimun, dan Kalimantan. Kapal luar daerah tersebut menggunakan Pelabuhan Perikanan Merauke untuk melakukan aktivitas bongkar muat ikan. Kapal-kapal luar daerah melakukan aktivitas penangkapan di WPP 718 dan mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan Merauke. Layanan yang diberikan oleh pengelola pelabuhan adalah layanan tambat labuh, bongkar muatan ikan, dan pengisian air bersih. Pengisian BBM dilakukan di Pelabuhan Merauke.

Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Merauke dipindahkan menggunakan truk ke *cold storage*. Hasil tangkapan nelayan tersebut dikirim ke Pulau Jawa (Surabaya/Probolinggo dan Indramayu/Jakarta) menggunakan kontainer berpendingin melalui Pelabuhan Merauke. Ikan dikirim menggunakan kontainer berpendingin (20 dan 40 *feed*) dengan biaya 46 juta rupiah per kontainer dengan tujuan Surabaya. Selanjutnya, kontainer dikirim ke lokasi tujuan menggunakan truk.

2. Tersedianya BBM di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke

BBM merupakan salah satu faktor produksi utama dalam upaya penangkapan ikan. Kebutuhan BBM untuk keperluan kapal perikanan dipenuhi melalui stasiun pengisian bahan bakar umum

(SPBU). Sebelum SKPT beroperasi, nelayan mengisi BBM di kawasan Pelabuhan Merauke. Sebelum mengisi BBM, kapal bersandar di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke. Hal ini mengganggu alur laut bagi kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Merauke. Saat ini BBM sudah tersedia di SPBU di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke sehingga kapal nelayan bisa mengisi BBM di Pelabuhan Perikanan Merauke.

Program SKPT didukung oleh program lain yang saling berkaitan. Salah satunya adalah penetapan harga BBM tunggal. Pemerintah telah berupaya pemerataan dan memenuhi kebutuhan BBM di berbagai wilayah. Pemerintah melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 telah menetapkan satu harga BBM. Penetapan tersebut dicanangkan pemerintah untuk mengupayakan pemerataan biaya di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu implementasi instruksi presiden (inpres). Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan secara Nasional diimplementasikan sejak 1 Januari 2017. Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang menjadi perhatian dalam program BBM satu harga.

Untuk percepatan penerapan peraturan tersebut yang berkaitan dengan penerapan harga BBM satu harga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ditetapkan bahwa kapal dengan ukuran kurang dari 30 GT menggunakan BBM subsidi dengan harga Rp5.150,00, sedangkan kapal dengan ukuran lebih dari 30 GT menggunakan BBM industri dengan harga Rp10.100,00. BBM subsidi yang jumlahnya terbatas menyebabkan kapal bisa menunggu antrean sampai dengan 2 minggu. Kapal yang menunggu terlalu lama menyebabkan antrean kapal di kawasan pelabuhan sehingga mengganggu alur keluar masuk kapal umum yang melewati kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke menuju kawasan Pelabuhan Merauke. Saat ini telah tersedia fasilitas SPBN di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke sehingga kapal perikanan tidak perlu antre untuk mengisi BBM di Pelabuhan Merauke.

3. Berkembangnya industri galangan kapal lokal

Beroperasinya SKPT di Pelabuhan Perikanan Merauke mendorong berkembangnya industri galangan kapal. Sejak tahun 2015 telah berkembang industri galangan kapal lokal. Kapal-kapal yang dibuat berukuran sekitar 30 GT. Kapal-

kapal baru ini merupakan pesanan para pelaku usaha penangkapan, baik masyarakat lokal maupun masyarakat luar daerah (Jawa, Tanjung Balai, Sulawesi, dan Kalimantan), yang mempunyai usaha di kawasan Merauke. Usaha galangan kapal berkembang di sepanjang Pantai Lampu Satu. Namun, karena pesatnya perkembangan galangan kapal, sebagian usaha galangan kapal dipindahkan ke sisi Sungai Maro. Sampai saat ini telah berkembang beberapa industri galangan kapal di Merauke. Berkembangnya usaha galangan kapal tersebut diharapkan mampu mengisi kebutuhan kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPP 718 dan melakukan aktivitas bongkar di Pelabuhan Perikanan Merauke.

4. Pemanfaatan fasilitas *integrated cold storage* (ICS)

Berkembangnya industri perikanan memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Salah satu fasilitas yang penting dan sangat diperlukan adalah *cold storage*. ICS merupakan salah satu sarana prasarana yang sangat penting dalam mata rantai bisnis perikanan. Ketersediaan ICS dapat memudahkan dalam pengelolaan ikan hasil tangkapan nelayan. Namun, ketersediaan ICS masih sangat terbatas. Bertambahnya produksi hasil tangkapan nelayan perlu ditangani agar kualitas ikan tidak menurun/rusak.

Di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke telah dibangun ICS yang saat ini telah digunakan untuk pemrosesan ikan hasil tangkapan. Selain ICS di kawasan pelabuhan, tersedia beberapa *cold storage* yang dikelola oleh perorangan/swasta/koperasi yang terletak di luar kawasan pelabuhan perikanan. *Cold storage* milik perorangan biasanya digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan kapal milik sendiri dan ikan hasil pembelian dari hasil tangkapan nelayan lain. *Cold storage* yang dikelola oleh koperasi digunakan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan nelayan lokal.

5. Jasa pengiriman menggunakan kargo/kontainer berpendingin.

Sistem logistik dan transportasi merupakan salah satu faktor penting. Meskipun sistem tersebut di luar kewenangan SKPT Merauke, hal tersebut menjadi faktor penting dalam mata rantai bisnis perikanan. Wilayah Merauke merupakan wilayah perbatasan yang permasalahan transportasinya menjadi faktor penting sehingga harus mendapatkan perhatian. Pemerintah melalui program tol laut

telah berusaha mengatasi permasalahan sistem transportasi dari dan ke wilayah perbatasan. Trayek T-11 program tol laut melayani jalur pelayaran (kapal *crossing*) Tanjung Perak/Surabaya-Timika-Agats-Merauke (pulang pergi) dengan waktu tempuh sekitar 2 minggu. Tambahan program tol laut diharapkan dapat menambah jumlah dan frekuensi kapal yang mengangkut barang dari dan ke Merauke. Ketidakseimbangan volume barang yang didistribusikan dari dan ke Merauke merupakan salah satu permasalahan. Kontainer berpendingin, misalnya, selalu penuh dan bahkan kurang sewaktu berangkat dari Merauke. Akan tetapi, kontainer tersebut kekurangan muatan sewaktu berangkat dari Surabaya ke Merauke.

Beroperasinya SKPT Merauke di kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke telah meningkatkan aktivitas usaha perikanan di Kabupaten Merauke. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi. Diperlukan upaya percepatan penyelesaian masalah untuk mendukung bisnis perikanan di kawasan SKPT Kabupaten Merauke (Tabel 6).

Penyelesaian permasalahan tersebut dapat mendorong peningkatan aktivitas usaha perikanan di Merauke. Dalam jangka panjang, sektor perikanan diharapkan menjadi sektor yang berkembang dan dapat memberikan dampak ekonomi pada Kabupten Merauke dan Provinsi Papua. Salah satu indikator keberhasilan pengembangan wilayah yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah adalah produksi dan produktivitas, kemudian yang kedua adalah efisiensi yang terkait dengan meningkatnya kemampuan teknologi/sistem (Riyadi, 2000).

Uraian di atas menunjukkan pembangunan SKPT Merauke mampu mendorong peningkatan aktivitas perikanan yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Merauke. Pembangunan SKPT Merauke dilakukan dengan memperkuat dan menambah fasilitas fisik untuk menunjang aktivitas usaha perikanan. Upaya peningkatan aktivitas perikanan di SKPT Merauke melibatkan berbagai pihak dan dukungan kebijakan/regulasi lain. Regulasi penting yang mendukung peningkatan operasional SKPT adalah program bantuan oleh kementerian dan pemda, kebijakan BBM satu harga, dukungan dan koneksi kawasan SKPT dengan kawasan Pelabuhan Merauke sebagai bentuk koneksi

Tabel 6. Progres Fasilitas dan Infrastruktur dan Pemanfaatannya di Kawasan Pelabuhan Perikanan Merauke.

Table 6. Progress of Completeness of Facilities and Infrastructure in the Merauke Fishery Port Area.

Fasilitas/ Facilities	Progres/ Progress	Tindak lanjut/ Follow up	Instansi/ Agency
Sertifikasi dan hibah status tanah/ <i>certification and status of land grants</i>	Proses sertifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke diharapkan segera selesai/ <i>the certification process that carried out by the Merauke Regency Fisheries Service is expected to be completed soon.</i>	Perlu dilakukan percepatan proses sertifikasi tanah dan serah terima hibah ke Kementerian KP/ <i>it is necessary to accelerate the process of land certification and handover of grants to the Ministry of Marine and Fisheries.</i>	Dinas perikanan, pemda, BPN, KKP/ <i>fisheries service, regional government, National Land Agency, Ministry of Marine Affairs and Fisheries</i>
Pembangunan jalan penghubung langsung antara pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan tempat penimbunan kargo sebagai sarana ekspor/ <i>construction of connecting roads with public ports and cargo storage areas for export</i>	Proses pembahasan dengan pihak Pelabuhan Merauke/ <i>discussion process with Merauke Port</i>	Pembahasan rencana detail/ <i>detailed plan discussion</i>	Dinas KP, Pelabuhan Merauke, dinas perhubungan laut, pemda/ <i>Marine and Fisheries Service, Merauke Port, sea transportation service, regional government</i>

Sumber: berbagai sumber diskusi dengan para pemangku kepentingan (2018)/*Source: discussions with stakeholders (2018).*

dengan daerah lain, penyediaan jaringan listrik oleh PLN, penyediaan jasa kontainer berpendingin yang memadai, dan kerja sama dengan pihak swasta sebagai pelaku usaha.

Sinergi program SKPT dengan program-program pemerintah lainnya diharapkan mampu meningkatkan dampak pembangunan SKPT. Program BBM satu harga dan tol laut mampu meningkatkan aktivitas usaha, jaminan ketersediaan BBM, serta kepastian sistem logistik dan distribusi hasil tangkapan. Dampak ekonomi dari aktivitas perikanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu manfaat langsung [*direct*], tidak langsung [*indirect*] dan ikutan [*induced*] (Linberg, 1996). Manfaat langsung timbul dari kegiatan perikanan (penangkapan) yang memerlukan input berupa tenaga kerja/ABK, BBM, es, air bersih, perbekalan/ransum, dan lain-lain. Input tersebut diperoleh dari sektor lain. Hal ini menimbulkan manfaat tidak langsung (*indirect benefit*). Jika ABK berasal dari daerah setempat/lokal, pengeluaran dari ABK lokal akan menimbulkan *induced benefit* di lokasi tersebut. Tidak semua manfaat atau dampak ekonomi tersebut dinikmati oleh masyarakat setempat. Apabila input tersebut didatangkan dari luar daerah atau impor, perputaran uang tidak menimbulkan *indirect benefit*, tetapi suatu

kebocoran (*leakage*) manfaat. Aliran uang dari aktivitas perikanan ke masyarakat lokal pada akhirnya menciptakan dampak ekonomi dan kebocoran ekonomi. Namun demikian, hasil penelitian (Sachs & Warne, 1998) menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya tidak selalu menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dan mungkin sebenarnya telah menghambat pertumbuhan rata-rata. Kasus tersebut terjadi di Bolivia, Meksiko, dan Venezuela. Melimpahnya sumber daya tidak secara permanen meningkatkan PDB per kapita dan selanjutnya diikuti perlambatan pertumbuhan ((Sachs & Warne, 1998).

Manfaat atau dampak aktivitas perikanan SKPT Merauke dapat diilustrasikan sebagai keterkaitan ke hulu dan ke hilir (Bene, 2006). Aktivitas perikanan menciptakan kesempatan dan peluang penciptaan lapangan kerja pada sektor hulu dan sektor hilir. SKPT Merauke berdampak pada aktivitas usaha perikanan tangkap oleh para pelaku usaha. Aktivitas usaha perikanan ke hulu mampu menggerakkan aktivitas-aktivitas, antara lain investasi kapal dan alat penangkapan ikan, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan, perbengkelan, dan penyediaan perbekalan. Kapal-kapal yang melakukan aktivitas penangkapan di SKPT Merauke menjadi sumber pendapatan

bagi pelaku usahanya. Usaha perikanan mampu menggerakkan usaha penyedia pasokan bahan makanan bagi ABK, penyedia jasa perbengkelan, penyedia permodalan, penyedia es, penyedia air bersih, penyedia BB dan oli, penyedia jasa keuangan, dan lain-lain. Kegiatan perikanan juga mampu menggerakkan perekonomian di sektor hilir melalui aktivitas-aktivitas investasi tempat pengolahan ikan dan mesin pengolahan produk, jasa transportasi, jasa keuangan, *cold storage*, tenaga kerja, industri pengolahan, dan lain-lain. Dampak ke hulu dan hilir tersebut akhirnya mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang didorong aktivitas usaha penangkapan. Makin lama dampak yang dihasilkan akan makin besar.

Salah satu indikator dampak suatu pembangunan/program adalah peningkatan PDRB. Lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam perekonomian Kabupaten Merauke. Kontribusi sektor tersebut adalah 23,1% dari total nilai PDRB Kabupaten Merauke pada tahun 2020 (BPS, 2021). Berdasarkan *trend* pada tahun 2023, *share*-nya dapat mencapai 27,6%. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Merauke. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Suratman (2004) bahwa dampak kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, hasil penelitian Masruri (2020) menyatakan bahwa tingkat daya saing lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis dan mempunyai nilai *shift share* > 0. Namun, menurut tipologi klasen, sektor tersebut merupakan sektor yang lambat tumbuh dan relatif tertinggal. Oleh karena itu, program SKPT diharapkan mampu meningkatkan *share* perikanan terhadap PDRB Kabupaten Merauke.

Upaya peningkatan dampak SKPT harus terus dilakukan dengan melakukan beberapa upaya. Pemerintah harus berupaya meningkatkan teknologi dan menambah kapasitas pelabuhan untuk meningkatkan aktivitas perdagangannya. Selain itu, perlu juga ditingkatkan jumlah investasi dengan memfasilitasi insentif investasi agar investor tertarik untuk berinvestasi (Kuncoro, 2016). Investasi diarahkan ke daerah yang kurang berkembang dengan membangun sarana dan prasarana pendukung.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kawasan SKPT Merauke yang berpusat di Pelabuhan Perikanan Merauke telah melakukan fungsi-fungsi layanan, terutama untuk mendukung aktivitas kapal-kapal perikanan (layanan pembongkaran, perbekalan, BBM, dan perizinan). Layanan tersebut dilakukan untuk mendukung bisnis perikanan di PPN Merauke. Dampak pembangunan SKPT Merauke adalah terjadinya peningkatan aktivitas bisnis perikanan (penangkapan, tersedianya *cold storage*, distribusi dan transportasi dengan menggunakan kontainer berpendingin, dan aktivitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumber daya perikanan). Upaya penyempurnaan peran dan fungsi SKPT terus dilakukan. Kekurangan-kekurangan yang masih harus dipecahkan adalah masalah lahan, peningkatan pemanfaatan dan operasional *cold storage*, TPI, penyediaan BBM di kawasan pelabuhan, dan penyediaan perbekalan.

Operasionalisasi Pelabuhan Perikanan Merauke sebagai sentral SKPT dapat meningkatkan aktivitas bisnis di kawasan pelabuhan dan wilayah Merauke pada umumnya. Telah beroperasinya Pelabuhan Perikanan Merauke sebagai sentra aktivitas bongkar ikan hasil tangkapan dapat mendorong peningkatan aktivitas bisnis turunan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi di Merauke.

Penguatan peran SKPT Merauke dalam meningkatkan aktivitas usaha perikanan berbasis perikanan tangkap memerlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan yang saling terkait. Pemangku kepentingan tersebut adalah Pelabuhan Perikanan Merauke, Pelabuhan Merauke, Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, KSOP Pelabuhan Merauke, Kantor Karantina Kabupaten Merauke, Kantor Pengawasan PSDKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan Merauke, Pertamina, Polair, Pangkalan TNI Angkatan Laut, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

Peningkatan aktivitas usaha perikanan mampu mendorong penciptaan peluang kerja ke hulu dan ke hilir yang didukung oleh ketersediaan fasilitas dan sarana SKPT Merauke/Pelabuhan Perikanan Merauke. Kabupaten Merauke berada di wilayah perbatasan dan termasuk daerah belum maju sehingga masih diperlukan peran pemerintah untuk melakukan investasi agar dapat menarik

pelaku usaha untuk terlibat investasi di kawasan SKPT Merauke. Peran pemerintah masih sangat diperlukan karena daerah di perbatasan dan belum maju tidak menarik pihak swasta untuk berinvestasi. Pendekatan pembangunan dengan strategi kewilayahan diharapkan memberikan dampak yang lebih besar. Masuknya investasi pemerintah akan diikuti pihak swasta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu lancarnya kegiatan penelitian percepatan operasionalisasi SKPT Merauke. Berbagai pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan penelitian ini adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dan staf, Kepala Pelabuhan Perikanan Merauke/Kepala SKPT Merauke dan staf, Kepala BKIPM Merauke dan staf, Kepala Satuan Pengawasan PSDKP dan staf, penyuluh perikanan, serta masyarakat pelaku usaha yang ada di kawasan SKPT Merauke. Penelitian ini berhasil berkat kerja sama dan bantuan dari semua pihak. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan kerja sama semua pihak.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini, kami nyatakan terkait kontribusi setiap penulis dalam pembuatan karya tulis, penulis yang berkontribusi adalah Budi Wardono, sebagai kontributor utama serta Hikmah dan Hakim Miftahul Huda sebagai kontributor anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. M. (2011). *Keberlanjutan perikanan pelagis di Ternate dan strategi pengembangannya* (Tesis). Institut Perikanan Bogor, Bogor.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua [BPS]. (2020). *Produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha tahun 2015-2019*. BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke [BPS]. (2020). *Produk domestik regional bruto kabupaten merauke menurut lapangan usaha tahun 2015-2019*. BPS Kabupaten Merauke.
- Bene, C. (2006). Small-scale fisheries: Assessing their contribution to rural livelihoods in developing countries. *FAO Fisheries Circular 1008*. Rome: FAO.
- Berkes, F., Mahon, R., McConney, P., Pollnac, R., & Pomeroy, R. (2001). *Managing small-scale fisheries*. Ottawa, Canada: International Development Research Centre.
- Bjorndal, T., Child, A., & Lem, A. (2014). Value chain dynamics and the small-scale sector: Policy recommendations for small-scale fisheries and aquaculture trade. *FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 581*. Rome: FAO.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal SMARTek*, 8(1).
- Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. (2018). *Laporan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke*.
- Farhan, F., Wahyu, I., & Meganingrum, Y. (2020). Penerapan teori big push dalam pengembangan ekonomi lokal untuk mengatasi kemiskinan Jember. *Jurnal Matrapolis*.
- Gantara, W.P., & Achmadi, T. (2012). Model pengembangan wilayah untuk pembangunan pelabuhan: Studi kasus pantai selatan Jawa Timur. *Jurnal Teknik ITS*, 1.
- Jaya, W.K. (1999). *Analisis potensi keuangan daerah pendekatan makro*. Yogyakarta: PPPEB UGM.
- Kepmen-KP 13/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/Kepmen-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan. (2019). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/Kepmen-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. (2016). Jakarta: KKP.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/Kepmen-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. (2017). Jakarta: KKP.
- KKP [Kementerian Kelautan dan Perikanan]. (2017). *Master plan pembangunan PKKPT Kabupaten Sabang*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kuncoro, M. (2016). Regional inequality in indonesia, 1994-2012. *The Business and Management Review*, 8(1).
- Marshall, C., & Rossman, G.B. (2015). *Designing qualitative research*. Thousand Oaks, United States: Sage Publication
- Masruri. (2020). Analisis daya saing ekonomi Provinsi Papua tahun 2011-2018 (studi kasus kabupaten/kota di Provinsi Papua). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2).

- PSDKP. (2018). *Laporan tahun 2015-2017*. Pangkalan PSDKP Merauke.
- PPN Merauke. (2019). *Laporan tahunan PPN Merauke*. Papua: PPN Merauke.
- Riyadi, D.M.M. (2000). Pembangunan daerah melalui pengembangan wilayah. Makalah disampaikan pada acara *Diseminasi dan Diskusi Program-Program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Daerah*. Hotel Novotel, Bogor, 15-16 Mei 2000.
- Rustiadi, E., Hakim, S.S., & Panuju, D.R. (2017). *Perencanaan dan pengembangan wilayah* (edisi kedua). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Rustiadi, E. (2003). Makalah disampaikan kepada Staf Dinas Perikanan dalam *Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (ICZPM)*, kerja sama PKSPL IPB dengan Departemen Kelautan dan Perikanan. Bogor, 11 Agustus–18 Oktober 2003.
- Sachs, D. J., & Warne, M. A. (1998). The big push, natural resource booms and growth. *Journal of Development Economics*, 59(1), 43-76.
- Santandrea, J., Samuel, S., & Elvi, E. (2018). Kebijakan akselerasi pembangunan infrastruktur dalam memenuhi hak konstitusional warga negara wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. *Staatsrecht*, DOI: <https://doi.org/10.15408/siclj.v2i1.9602>.
- Sari, Y.D., Syaukat, Y., Kusumastanto, T., & Hartoyo, S. (2019). *Evaluasi ekonomi kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing terhadap sumber daya perikanan demersal di wilayah pengelolaan perikanan 718* (Disertasi). Institut Pertanian Bogor.
- Satria, A. (2009). *Ekologi politik nelayan*. Bantul, Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Sjafrizal (2012). *Ekonomi wilayah dan perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suman, A., Satria, F., Nugraha, B., Priatna, A., Khairul, & Mahiswara (2018). Status stok sumber daya ikan tahun 2016 di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) dan alternatif pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 10(2).
- Suratman, E. (2004). Dampak kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Barat: Analisis simulasi dengan pendekatan sistem neraca sosial ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 5(1).
- Taeran, I. (2007). *Tingkat pemanfaatan dan pola musim penangkapan beberapa jenis ikan pelagis ekonomis penting di Provinsi Maluku Utara* (Tesis). Institut Perikanan Bogor, Bogor.
- Tarigan, R. (2008). *Ekonomi regional, teori dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yin, R.K. (2002). *Case study research, design and methods* (3th ed.) *Applied Social Research Method Volume 5*. California: Sage Publications.
- Zulham, A., Arthatiani, F.Y., Hafsaridewi, R., & Mira (2019). *Perspektif pembangunan perikanan di pulau terluar*. Bogor: IPB Press.